

## ANALISIS ILUSI FISKAL DI PROVINSI NTT

**Rafael U.L. Sobang**

Universitas Nusa Cendana

rafisobang11@gmail.com

**Aldarine Molidya**

Universitas Nusa Cendana

aldarine.molidya@staf.undana.ac.id

**Rikhard T. Ch. Bolang**

Universitas Nusa Cendana

rikhard.bolang@staf.undana.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan fenomena *ilusi fiskal* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta menilai pengaruh dana transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari 22 kabupaten/kota di NTT selama periode 2020–2024. Analisis dilakukan dengan model regresi data panel menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja daerah, yang menandakan adanya *ilusi fiskal*, yaitu kondisi ketika peningkatan transfer dari pemerintah pusat tidak diikuti peningkatan belanja produktif. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pinjaman Daerah tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah di NTT masih ditandai oleh tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya terwujud.

**Kata kunci :** *Ilusi fiskal, Dana transfer, DAU, Belanja daerah, Kemandirian fiskal.*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the existence of the fiscal illusion phenomenon in East Nusa Tenggara Province (NTT) and to examine the effect of transfer funds and local revenue (Pendapatan Asli Daerah or PAD) on regional expenditure. The research employs a quantitative descriptive method using secondary data from 22 regencies/cities in NTT for the period of 2020–2024. The analysis is conducted using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results show that the General Allocation Fund (DAU) has a significant negative effect on regional expenditure, indicating the presence of fiscal illusion—a condition where an increase in central government transfers is not followed by an increase in productive spending. Conversely, Local Revenue (PAD) and Revenue Sharing Funds (DBH) have a significant positive effect on regional expenditure, while the Special Allocation Fund (DAK) and Regional Loans have no significant effect. These findings indicate that the fiscal structure of NTT remains characterized by a high level of dependency on central government transfers, reflecting that regional fiscal independence has not been fully achieved.*

**Keywords:** *Fiscal illusion, Transfer funds, DAU, Regional expenditure, Fiscal independence.*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Namun dalam praktiknya, banyak daerah masih menghadapi permasalahan mendasar, yaitu tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan fenomena yang disebut *ilusi fiskal*, yaitu persepsi keliru terhadap kemampuan keuangan daerah akibat besarnya dana transfer dari pusat.

Fenomena *ilusi fiskal* membuat pemerintah daerah merasa memiliki kapasitas keuangan yang lebih tinggi daripada kondisi sebenarnya. Akibatnya, belanja publik tidak selalu diarahkan pada kegiatan produktif, tetapi cenderung pada belanja rutin yang kurang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Situasi ini berpotensi menurunkan semangat daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal tinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS dan Kementerian Keuangan, porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam struktur pendapatan daerah di NTT rata-rata mencapai lebih dari 60 persen, sedangkan kontribusi PAD masih berkisar 5–15 persen. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di NTT belum sepenuhnya mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Fidiastuti (2021) menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal daerah, yang mengindikasikan adanya *ilusi fiskal*. Febrianti dan Badrudin (2023) juga menyimpulkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap dana transfer menurunkan kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, Pratama (2020) menegaskan bahwa peningkatan PAD berkontribusi positif terhadap belanja produktif dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya *research gap* terkait sejauh mana *ilusi fiskal* memengaruhi perilaku

fiskal pemerintah daerah, khususnya di wilayah dengan ketergantungan tinggi seperti NTT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan fenomena *ilusi fiskal* di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menilai pengaruh dana transfer dan PAD terhadap belanja daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran publik.

### Kajian Teori

#### 1. Konsep Ilusi Fiskal

Ilusi fiskal merupakan kondisi ketika pemerintah daerah maupun masyarakat memiliki persepsi yang keliru terhadap kondisi keuangan daerah akibat kebijakan fiskal tertentu. Oates (1988) menjelaskan bahwa ilusi fiskal (fiscal illusion) terjadi ketika peningkatan penerimaan dari pemerintah pusat dipersepsikan sebagai peningkatan kemampuan fiskal daerah, padahal tidak diikuti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Fenomena ini sering muncul dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, ketika sebagian besar pembiayaan daerah masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### 2. Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (Musgrave & Musgrave, 1989). Dalam sistem pemerintahan daerah, teori ini menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya publik, termasuk bagaimana transfer dari pemerintah pusat dimanfaatkan secara efisien oleh daerah.

#### 3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar daerah dapat mengatur pembiayaan publik sesuai kebutuhan lokal. Namun, ketergantungan terhadap transfer pusat menimbulkan risiko terjadinya ilusi fiskal, di mana daerah merasa memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar daripada kenyataannya (Mardiasmo, 2018).

#### 4. Dana Transfer dan Belanja Daerah

Dana Perimbangan terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil (DBH): bagian pendapatan pusat yang dibagikan ke daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK): untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional.

Peningkatan dana transfer sering kali tidak meningkatkan belanja produktif (belanja modal), melainkan memperbesar belanja rutin. Hal ini memperkuat indikasi adanya ilusi fiskal (Fidiastuti, 2021).

#### 5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber utama pembiayaan yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Menurut Sholihin (2015), semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin rendah potensi ilusi fiskal. Ketika PAD rendah, ketergantungan terhadap transfer pusat membuat daerah lebih pasif dan kurang inovatif dalam menggali potensi ekonomi lokal.

#### 6. Model Analisis Ilusi Fiskal

Dalam penelitian ini, ilusi fiskal dianalisis dengan menggunakan model regresi data panel. Variabel dependen adalah Belanja Daerah (BD), sedangkan variabel independen terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pinjaman Daerah (PD). Model regresi umum ditulis sebagai berikut:

$$Yit = \alpha + \beta_1 X1it + \beta_2 X2it + \beta_3 X3it + \beta_4 X4it + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

i = Cross Section

t = Time Series

$\alpha$  = Costanta

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Bagi Hasil (DBH)

X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X4 = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = Standart Erorr

Jika koefisien (DAU) berpengaruh negatif signifikan, maka hal ini menunjukkan

adanya ilusi fiskal — yaitu peningkatan transfer dari pusat justru diikuti penurunan belanja produktif daerah.

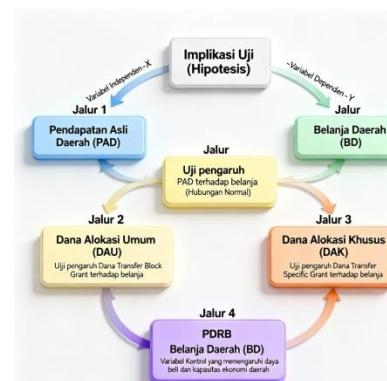
#### 7. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya mendukung adanya fenomena ilusi fiskal di Indonesia. Fidiastuti (2021) menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal daerah. Febrianti & Badrudin (2023) menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer menurunkan kemandirian fiskal daerah. Pratama (2020) menegaskan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja produktif dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ketergantungan terhadap transfer pusat tanpa peningkatan PAD yang signifikan akan memperkuat ilusi fiskal di daerah.

#### 8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hubungan antara dana transfer dan belanja daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Dana transfer (DAU, DAK, DBH) → dapat menimbulkan ilusi fiskal bila tidak digunakan untuk belanja produktif.
- b. PAD → berperan mengurangi ilusi fiskal dengan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
- c. Belanja Daerah → mencerminkan efektivitas penggunaan dana transfer dan PAD.



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran Penelitian Ilusi Fiskal di Provinsi NTT

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT periode 2020–2024. Data diperoleh dari BPS, BPK, dan Kementerian Keuangan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Uji pemilihan model meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Variabel dependen adalah Belanja Daerah, sedangkan variabel independen terdiri atas DAU, DAK, DBH, PAD, dan Pinjaman Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis fenomena ilusi fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menggunakan data sekunder dari dua puluh dua kabupaten/kota selama periode 2020 hingga 2024. Data yang digunakan meliputi Belanja Daerah sebagai variabel dependen, serta Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pinjaman Daerah sebagai variabel independen. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah di NTT masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama DAU yang rata-rata mencapai lebih dari enam puluh persen dari total pendapatan daerah. Sebaliknya, kontribusi PAD masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar lima hingga lima belas persen dari total pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah di NTT belum sepenuhnya mandiri dalam pemberian pembangunan.

Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan melalui serangkaian uji pemilihan model, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Berdasarkan hasil ketiga uji tersebut, model yang paling sesuai digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) karena mampu menggambarkan perbedaan karakteristik antar daerah yang cukup besar di Provinsi NTT. Model ini digunakan untuk menilai pengaruh variabel-variabel dana transfer dan PAD terhadap belanja daerah serta

mengidentifikasi keberadaan ilusi fiskal di daerah penelitian.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja daerah. Artinya, peningkatan DAU justru diikuti dengan penurunan proporsi belanja produktif, yang menunjukkan adanya gejala ilusi fiskal. Peningkatan DAU sering ditafsirkan sebagai kenaikan kemampuan fiscal daerah, sehingga menurunkan dorongan untuk menggali sumber PAD secara optimal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan transfer dari pemerintah pusat belum sepenuhnya mendorong kemandirian fiskal, melainkan menciptakan ketergantungan baru yang berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Fidiastuti (2021) serta Febrianti dan Badrudin (2023) yang menemukan bahwa ketergantungan fiskal terhadap DAU dapat menimbulkan perilaku pasif dalam pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DAK diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, realisasinya belum berjalan optimal. Efektivitas DAK sangat bergantung pada kemampuan teknis dan administratif pemerintah daerah dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan yang didanai dari dana tersebut. Keterlambatan penyaluran, perbedaan prioritas pembangunan antar daerah, dan rendahnya kapasitas kelembagaan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi DAK.

Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, yang menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan DBH, semakin tinggi pula belanja daerah yang dialokasikan untuk kegiatan produktif. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam atau pajak bersama lebih mendorong daerah untuk menggunakan anggaran secara efisien. Hasil ini sesuai dengan teori keuangan publik yang menyatakan bahwa sumber pendapatan yang berasal dari kontribusi daerah sendiri cenderung dikelola dengan lebih hati-hati dan efisien karena

memiliki tanggung jawab fiskal langsung terhadap masyarakat lokal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan PAD menggambarkan peningkatan kemampuan fiskal daerah yang lebih mandiri. Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung lebih mampu membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Hasil ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola pendapatan dan pembelanjaannya sendiri. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin rendah potensi terjadinya ilusi fiskal. Dengan kata lain, PAD menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menekan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Sementara itu, Pinjaman Daerah (PD) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi NTT belum secara optimal memanfaatkan instrumen pinjaman sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sebagian besar pinjaman daerah masih digunakan untuk kegiatan bersifat jangka pendek dan operasional, bukan untuk investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena ilusi fiskal memang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) menyebabkan persepsi keliru tentang kemampuan keuangan daerah. Peningkatan transfer dari pusat tidak selalu diiringi oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja publik. Hal ini memperkuat teori ilusi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1988), yaitu bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat dapat menimbulkan persepsi semu terhadap kemampuan keuangan di tingkat daerah.

Dengan demikian, peningkatan kemandirian fiskal melalui penguatan PAD menjadi kunci penting untuk mengatasi fenomena ini. Pemerintah daerah perlu memperluas basis pajak daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan memfokuskan penggunaan belanja daerah pada sektor-sektor produktif seperti

pertanian, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Upaya ini akan membantu daerah dalam membangun kapasitas fiskal yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena ilusi fiskal memang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini tercermin dari hasil analisis regresi yang memperlihatkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya, peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat justru tidak diikuti oleh peningkatan belanja produktif di tingkat daerah. Pemerintah daerah cenderung menafsirkan peningkatan DAU sebagai peningkatan kapasitas keuangan sendiri, sehingga menurunkan upaya untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat dan rendahnya kemandirian fiskal daerah di NTT.

Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, yang berarti semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan. Dana Bagi Hasil (DBH) juga berpengaruh positif signifikan, menunjukkan bahwa penerimaan dari kontribusi daerah sendiri dapat meningkatkan belanja produktif dan mengurangi ketergantungan fiskal. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pinjaman Daerah (PD) belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, menunjukkan bahwa pemanfaatannya masih belum optimal dalam mendukung kemandirian fiskal.

Secara umum, hasil penelitian ini memperkuat teori ilusi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1988), bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat dapat menimbulkan persepsi semu terhadap kemampuan keuangan daerah. Daerah yang terlalu bergantung pada dana transfer cenderung mengabaikan potensi sumber pendapatan lokal dan mengalokasikan anggaran secara kurang efisien. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan dalam mengurangi dampak negatif ilusi fiskal.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah daerah di Provinsi NTT memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, dan jasa lokal yang memiliki daya saing. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah agar dana transfer yang diterima dapat dialokasikan secara efisien dan produktif. Selain itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan serta pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran publik benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pengembangan model dengan menambahkan variabel-variabel lain seperti efektivitas belanja publik, kualitas tata kelola keuangan daerah, atau pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan cakupan waktu yang lebih panjang dan variabel yang lebih beragam, diharapkan hasil penelitian berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika ilusi fiskal dan kemandirian fiskal daerah di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah. (2021). Efisiensi Ilusi Fiskal dan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v5i1.5526>
- Bpk. (2019). Struktur Apbd Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur Apbd, 1219–5805.
- Bps 2024. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka.
- Fidiastuti, A. (2021). Ilusi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Febrianti, & Badrudin. (2023). Ilusi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 34(1), 15–29. <https://doi.org/10.53916/jam.v34i1.79>
- Mardiasmo. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1988). *On the Nature and Measurement of Fiscal Illusion: A Survey*.